

# SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN: SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN DAN PROSPEK REPELITA III DAERAH SUMATERA BARAT

Rustian KAMALUDDIN\*

## PENDAHULUAN

Sebagaimana dikemukakan dalam Repelita III Daerah Sumatera Barat bahwa sebagai sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai adalah sebesar 7% per tahun dan juga dikemukakan berbagai sasaran lainnya dalam pembangunan daerah di Sumatera Barat. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diperlukan usaha-usaha dan investasi di daerah yang didasarkan pada berbagai sumber pembiayaan untuk pembangunan.

Sesungguhnya sumber pembiayaan pembangunan daerah itu ada berbagai macam, baik yang bersumber dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Sumber pembiayaan dari dalam daerah dapat berupa Tabungan Pemerintah Daerah (tercermin dalam Anggaran Pembangunan Daerah), Tabungan Perusahaan, dan Tabungan Rumah Tangga. Di samping itu sumber pembiayaan dari luar daerah berupa Anggaran Pembangunan Negara (proyek sektoral Pelita Nasional), serta bantuan Inpres yaitu alokasi dana APBN yang disalurkan ke daerah melalui APBD pada masing-masing tingkat pemerintahan, sumber-sumber dalam negeri lainnya, seperti Kredit Investasi dan Investasi Swasta Dalam Negeri dan sumber luar negeri berupa Penanaman Modal Asing dan Bantuan Luar Negeri.

Oleh karena tinjauan pertengahan jalan pelaksanaan Repelita III ini lebih ditujukan dan diarahkan pada pemahaman serta langkah atau kebijaksanaan pemerintah daerah yang perlu ditempuh menjelang akhir Repelita III serta karena terbatasnya data yang tersedia, maka titik berat aspek yang akan ditinjau adalah sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri, khususnya APBD Daerah Tingkat I. Kemudian secara umum ditinjau pula perkembangan dan prospek sumber pembiayaan pembangunan yang berasal

---

\*Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Universitas Indonesia (1961). Banyak menulis buku dan karangan untuk berbagai majalah dan surat kabar.

dari APBN dan Bantuan Inpres yaitu sumber pembiayaan yang memegang peranan besar dalam pembangunan di daerah. Sedangkan sumber-sumber lainnya hanya digambarkan atau ditinjau secara umum dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber pembiayaan yang menjadi pokok pembahasan tersebut di atas.

### TINJAUAN KEBIJAKSANAAN REPELITA III

Pola pembiayaan pembangunan menurut Repelita III Sumatera Barat tidak banyak bedanya dengan yang dilakukan selama Repelita I dan II. Sebagian besar sumber pembangunan di daerah ini, yaitu sebesar Rp. 561.590,7 juta (79,46%) diperkirakan berasal dari luar daerah, sedangkan yang berasal dari dalam daerah sendiri relatif kecil, yaitu hanya sebesar Rp. 145.205,5 juta (20,54%). Dan dari sumber-sumber tersebut pembiayaan investasi pemerintah berjumlah sebesar Rp. 283.132,9 juta (40,06%), yang terdiri dari tabungan pemerintah daerah (dalam APBD, termasuk dana Bantuan Inpres) sebesar Rp. 36.206,5 juta (5,12%) dan dana pembangunan sektoral Pelita Nasional (dalam APBN yang terlokasikan) sebesar Rp. 246.926,4 juta (34,94%) dari jumlah sumber pembiayaan pembangunan keseluruhannya.

Mengingat sumber-sumber keuangan pemerintah, pusat dan daerah, adalah terbatas, maka kebutuhan akan sumber keuangan yang berasal dari investasi nonpemerintah sangat besar. Dalam Repelita III Sumatera Barat, diperkirakan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi nonpemerintah ini sebesar Rp. 423.663,2 juta (59,95%) yang terdiri dari tabungan perusahaan Rp. 70.086,3 juta (9,42%), tabungan rumah tangga Rp. 38.912,6 juta (5,50%), sumber dalam negeri lain-lain sebesar Rp. 117.684,5 juta (16,65%) dan sumber luar negeri sebesar Rp. 196.979,8 juta atau 27,87% dari jumlah sumber pembiayaan seluruhnya.

Khusus mengenai keuangan Daerah Tingkat I Sumatera Barat dapat dikemukakan bahwa dalam Repelita III diperkirakan penerimaan keuangan daerah seluruhnya berjumlah Rp. 156.404,9 juta, dengan sebagian besar sumber pembiayaan (rutin dan pembangunan) yang utama berasal dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 134.267,5 juta (85,85%), yang terdiri dari Bantuan Anggaran Rutin Rp. 113.970,8 juta (72,87%) dan Bantuan Anggaran Pembangunan Rp. 20.296,7 juta (12,98%) dari total penerimaan daerah. Sedangkan Pendapatan Daerah sendiri yang diperkirakan dapat dihasilkan selama Repelita III hanyalah sebesar Rp. 22.137,4 juta (14,15%) yang meliputi pendapatan rutin daerah sendiri Rp. 16.969,0 juta (10,85%) dan pendapatan pembangunan daerah sendiri sebesar Rp. 5.168,4 juta (3,38%). Ini berarti bahwa pola pembiayaan pembangunan daerah dalam APBD Daerah Tingkat I

Sumatera Barat, sebagaimana halnya pada periode Repelita sebelumnya, sangat tergantung pada sumber yang berasal dari bantuan pemerintah pusat. Dengan memperhitungkan bahwa perkiraan Pengeluaran Rutin selama periode Repelita III sebesar Rp. 135.445,7 juta, maka tabungan pemerintah daerah yang dapat diciptakan untuk pembangunan keseluruhannya adalah Rp. 156.404,9 juta dikurangi Rp. 135.445,7 juta yaitu sebesar Rp. 20.959,2 juta atau 13,40% dari penerimaan atau keuangan daerah keseluruhannya. Jumlah Rp. 20.959,2 juta inilah yang digunakan untuk membiayai pembangunan (sebagai Belanja Pembangunan) Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang bersumber dari keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa perkiraan atau target Pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I diperhitungkan dengan perkembangan pos-pos yang bersangkutan pada tahun-tahun sebelumnya, dan jumlahnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: Bantuan atau Subsidi Pemerintah Pusat, jumlah kendaraan bermotor, jumlah bus dan truk, volume pelayanan kesehatan, jumlah ekspor kayu logs, jumlah pesawat televisi, dan lain-lain. Sedangkan Pengeluaran Rutin Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor: jumlah pegawai khususnya guru SD, keperluan barang-barang, kebutuhan pemeliharaan, perjalanan dinas, dan subsidi pada daerah bawahan. Juga diproyeksikan dengan cara trend sejalan dengan perkiraan kemungkinan perkembangan faktor-faktor pengaruh masing-masing posnya di dalam periode Repelita III tersebut.

Atas dasar perhitungan dan perkiraan menurut proyeksi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan selanjutnya perincian sumber pembiayaan dari keuangan daerah, rutin dan pembangunan selama periode Repelita III sebagai berikut ini. Penerimaan Rutin Daerah sendiri yang berjumlah Rp. 16.969,0 juta atau 10,85% dari penerimaan daerah seluruhnya, terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 9.818,3 juta (62,28%), Retribusi Daerah Rp. 5.166,9 juta (3,30%), Penerimaan Dinas-dinas Rp. 663,0 juta (0,42%), Laba Perusahaan Daerah Rp. 714,2 juta (0,46%) dan Penerimaan Rutin Lain-lain sebesar Rp. 606,6 juta atau 0,39% dari jumlah Penerimaan Daerah seluruhnya.

Penerimaan Pembangunan yang diperoleh dari keuangan daerah sendiri adalah sebesar Rp 5.168,4 juta atau 3,30% dari penerimaan total daerah, meliputi penerimaan-penerimaan Royalties/Lisensi Fee sebesar Rp. 2.392,4 juta (1,53%), Ipeda sebesar Rp. 377,1 juta (0,24%) dan Penerimaan Pembangunan Lain-lain sebesar Rp. 2.397,9 juta atau 1,53% dari penerimaan daerah keseluruhannya. Demikianlah garis besarnya perkiraan susunan sumber pembiayaan dan keuangan daerah dalam Repelita III propinsi Sumatera Barat.

## PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1979/1980-1981/1982

**Umum**

Selama tiga tahun anggaran berjalannya Pelita III telah banyak dilaksanakan program pembangunan yang dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan pembangunan. Proyek sektoral Pelita Nasional (APBN) telah menelan biaya sebesar/sebanyak Rp. 37.865,9 juta (1979/1980), Rp. 66.296,5 juta (1980/1981) dan Rp. 68.955,7 juta (1981/1982) dengan jumlah total Rp. 173.091,1 juta. Ini berarti sudah melebihi perkiraan tiga tahun pertama sebagaimana yang diperkirakan dalam Repelita III (Rp. 121.424,4 juta), yaitu lebih besar 42,55% dari perkiraan dalam perencanaan. Di samping itu dana pembangunan daerah yang berasal dari pusat yang diperhitungkan dalam APBD di daerah, yaitu berbagai Bantuan Inpres Pembangunan Daerah (di sini tidak termasuk Bantuan Inpres Daerah Tingkat I) telah berkembang dan meningkat pula, yaitu dari Rp. 11.168,2 juta (1979/1980), Rp. 18.740,3 juta (1980/1981) dan Rp. 28.626,6 juta (1981/1982) dengan jumlah total sebesar Rp. 58.535,1 juta.

Selanjutnya pembiayaan yang berasal dari Daerah Tingkat I sendiri (termasuk Bantuan Inpres Tingkat I) yang tercermin dalam APBD Daerah Tingkat I Sumatera Barat telah berkembang dan meningkat pula. Belanja Pembangunan Daerah yang terlaksana dan dianggarkan telah meningkat dari sebanyak Rp. 2.985,4 juta (1979/1980) menjadi sebanyak Rp. 5.145,1 juta (1980/1981) dan Rp. 9.683,5 juta (1981/1982) dengan jumlah total selama tiga tahun sebesar Rp. 17.814,0 juta. Jumlah ini juga lebih besar dari perkiraan tiga tahun pertama Repelita III yang berjumlah Rp. 11.697,8 juta yaitu lebih 52,29% dari jumlah yang diperkirakan sebelumnya.

Sementara itu jumlah Pemupukan Dana dari perusahaan dan masyarakat melalui lembaga Perbankan telah pula menunjukkan peningkatannya, yaitu jumlah giro, deposito dan tabungan (termasuk Tabanas dan Taska) telah meningkat dari Rp. 24.173,8 juta (1979) menjadi Rp. 35.662,3 juta (1980) dan Rp. 48.179,3 juta (1981). Pemupukan dana ini telah turut membantu kemampuan lembaga perbankan untuk memberikan kredit perbankan pada berbagai usaha dan kegiatan di daerah. Adapun besarnya kredit perbankan keseluruhannya (termasuk Kredit Investasi, KIK dan KMKP) yang telah disalurkan/diberikan lembaga perbankan telah meningkat dari Rp. 46.667,9 juta (1979) menjadi Rp. 63.342,4 juta (1980) dan Rp. 99.844,7 juta (1981). Dan menurut keadaan hingga akhir 1980 jumlah PMDN sebanyak Rp. 66.842,7 juta dan PMA berjumlah AS\$ 42,743 ribu atau kira-kira Rp. 27.783,0 juta, yang ditanamkan pada berbagai bidang usaha dan perekonomian di daerah ini.

## **Keadaan Keuangan dan Sumber Pembiayaan Daerah Tingkat I**

Selama pelaksanaan tiga tahun pertama Repelita III garis-garis kebijaksanaan menurut program kerja Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat berlandaskan pada: ketentuan menurut GBHN, Repelita III Sumatera Barat, dan pedoman-pedoman Departemen Dalam Negeri. Dalam hubungan ini meliputi antara lain: (a) diberlakukannya prinsip anggaran berimbang; (b) kedudukan program dan proyek pembangunan daerah merupakan penunjang dan pelengkap program pembangunan nasional; (c) pemilihan program dan proyek dalam APBD selalu diperhatikan daya guna dan hasil guna dari alokasi penggunaan anggaran; (d) subsidi pembangunan untuk daerah bawahan yang disediakan dalam APBD Sumatera Barat diarahkan penggunaannya; dan (e) penggunaan dana dilakukan secara efektif dan efisien dalam arti belanja rutin dibatasi dan dihematkan untuk meningkatkan biaya pembangunan.

Dalam hubungan dengan garis kebijaksanaan tersebut di atas maka komposisi realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan mengikuti sistematika Repelita III tercermin dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa total APBD yang direalisasikan dan dianggarkan selama tiga tahun pertama Pelita III mencapai jumlah Rp. 107.799,7 juta, jumlah ini adalah 43,38% di atas yang diperkirakan menurut Repelita III (Rp. 75.185,2 juta). Hal ini terjadi terutama karena bantuan pemerintah pusat berupa subsidi rutin maupun subsidi pembangunan telah meningkat dan mencapai jumlah yang jauh lebih besar. Bantuan pemerintah pusat ini meningkat dengan laju pertumbuhan 45,36% per tahun, yaitu dari sebesar Rp. 18.590,6 juta (1979/1980) menjadi Rp. 39.283,1 juta (1981/1982), dengan perincian subsidi rutin meningkat dari Rp. 15.947,6 juta (1979/1980) menjadi Rp. 31.783,1 juta (1981/1982) dengan laju pertumbuhan 41,17% dan subsidi pembangunan meningkat dari Rp. 2.643,0 juta (1979/1980) menjadi Rp. 7.500,0 juta (1981/1982) dengan laju pertumbuhan 68,45% per tahun.

Sedangkan pendapatan daerah sendiri yaitu pendapatan rutin sendiri dan pendapatan pembangunan sendiri memperlihatkan peningkatan pula tetapi tidak terlalu tinggi. Pendapatan daerah sendiri ini telah meningkat dari Rp. 5.367,0 juta (1979/1980) menjadi Rp. 7.043,30 juta (1981/1982) dengan laju pertumbuhan 15,55% per tahun. Komposisinya terdiri dari pendapatan rutin sendiri telah meningkat dari Rp. 3.879,8 juta (1979/1980) menjadi Rp. 5.035,7 juta (1981/1982) dengan laju pertumbuhan 16,94% per tahun, dan pendapatan pembangunan sendiri telah meningkat dari Rp. 1.487,2 juta (1979/1980) menjadi Rp. 1.737,3 juta (1981/1982) dengan laju pertumbuhan 8,08% per tahun. Dan seperti halnya dengan Bantuan Pemerintah Pusat, maka pen-

Tabel 1

REALISASI DAN PENGANGGARAN SUMBER PENERIMAAN DAN BELANJA  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, 1979/1980-1981/1982  
(dalam jutaan rupiah -- harga berlaku)

Jenis	1979/1980	1980/1981	1981/1982	Jumlah	%
I. PENERIMAAN	23.957,6	37.516,0	46.326,1	107.799,7	100,00
1. Bantuan Pemerintah Pusat	18.590,6	31.445,3	39.283,1	89.319,0	82,86
Subsidi Rutin	15.947,6	26.254,3	31.783,1	73.985,0	68,63
Subsidi Pembangunan	2.642,0	5.191,0	7.500,0	15.334,0	14,23
2. Pendapatan Daerah Sendiri	5.367,0	6.070,7	7.043,0	18.480,7	17,14
Pendapatan Rutin	3.879,8	4.375,2	5.305,7	13.560,7	12,58
a. Pajak Daerah	2.519,9	3.225,4	3.771,8	9.517,1	8,83
b. Retribusi Daerah	894,2	576,9	673,0	2.144,1	1,99
c. Penerimaan Dinas-dinas	126,8	248,6	286,9	662,3	0,61
d. Laba Perusahaan Daerah	165,4	201,8	191,5	558,7	0,52
e. Lain-lain	173,5	122,5	382,5	678,5	0,63
Pendapatan Pembangunan	1.487,2	1.695,5	1.737,3	4.920,0	4,56
a. Ipeda 10%	86,7	88,6	108,0	283,3	0,26
b. Royalties/Lisensi Fee	765,5	875,9	544,6	2.186,0	2,03
c. Land Rent	6,9	13,0	15,9	35,8	0,03
d. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh	454,7	548,5	800,0	1.803,2	1,67
e. Lain-lain	173,4	169,5	268,8	611,7	0,57
II. PENGELUARAN	22.012,8	35.074,3	48.459,1	105.546,2	100,00
1. Pengeluaran Rutin	19.027,4	29.929,2	38.775,6	87.732,2	83,12
a. Belanja Pegawai	15.016,4	21.131,2	27.110,5	63.258,1	59,93
b. Belanja Rutin Lainnya	4.011,0	8.798,0	11.665,1	24.474,1	23,19
2. Pengeluaran Pembangunan	2.985,4	5.145,1	9.683,5	17.814,0	16,88

Catatan: Tahun 1979/1980 dan 1980/1981 angka realisasi, sedangkan tahun 1981/1982 angka APBD.

pendapatan daerah sendiri ini juga telah mencapai angka yang melebihi dari target yang diperkirakan untuk tiga tahun pertama Repelita III. Pendapatan daerah sendiri ini selama tiga tahun pertama Repelita III diperkirakan sebesar Rp. 11.192,3 juta, sedangkan yang direalisasi dan dianggarkan telah mencapai jumlah total Rp. 18.840,7 juta, berarti 65,12% lebih besar di atas yang diperkirakan sebelumnya.

Namun demikian jika kita lihat komposisi keuangan dan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang dilaksanakan selama tiga tahun pertama Pelita III ini tidak banyak bedanya dengan yang diperkirakan menurut Repelita III. Yang direalisasikan dan dianggarkan mempunyai perimbangan Bantuan Pemerintah Pusat sebesar 82,86% dan Pendapatan Daerah sendiri sebesar 17,14% dari total keuangan APBD. Sedangkan yang diperkirakan dalam Repelita III adalah Bantuan Pemerintah Pusat sebesar 85,11% dan Pendapatan Daerah sendiri sebesar 14,89% dari perkiraan total penerimaan keuangan daerah selama tiga tahun pertama Repelita III.

Di antara pendapatan daerah sendiri bagian penerimaan rutin yang jauh berada di atas perkiraan Repelita III adalah Pajak Daerah, yaitu selama tiga tahun pelaksanaan Pelita III telah berjumlah Rp. 9.517,1 juta berarti 100,04% di atas perkiraan sebelumnya yang berjumlah Rp. 4.757,7 juta. Juga penerimaan rutin lain-lain yang telah direalisasi dan dianggarkan berjumlah Rp. 678,5 juta yaitu sebesar 127,91% di atas perkiraan yang berjumlah Rp. 297,7 juta, hanya saja jumlahnya kecil. Besarnya peningkatan Pajak Daerah terutama karena jauh lebih besarnya jumlah kendaraan bermotor dari perkiraan serta tarif pajaknya yang telah ditingkatkan. Demikian pula pos-pos penerimaan rutin lainnya pada umumnya yang direalisasi adalah lebih besar daripada yang diperkirakan. Hal yang khusus ialah Retribusi Daerah, di mana jumlahnya yang dapat direalisasikan hanyalah sebesar Rp. 2.144,1 juta atau 19,13% di bawah yang diperkirakan dalam Repelita III, yaitu Rp. 2.651,4 juta. Hal ini terutama disebabkan antara lain karena pada dua tahun terakhir ini sumbangan wajib televisi untuk dana daerah dihapuskan.

Pendapatan daerah sendiri yang merupakan bagian penerimaan pembangunan pada umumnya terdapat pula peningkatannya, bahkan ada pos-pos yang tidak tercantum sebelumnya sebagai penerimaan dalam Repelita III, Land Rent (Rp. 35,8 juta) dan sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (Rp. 1.803,2 juta) yang diperoleh selama tiga tahun pertama Pelita III. Satu-satunya penerimaan yang lebih kecil dari perkiraan adalah Pendapatan Pembangunan Lain-lain, yaitu sebesar Rp. 611,7 juta, yang berarti 53,12% di bawah perkiraan Repelita III (Rp. 1.304,7 juta), hanya saja jumlahnya relatif kecil sekali. Sebagai hasil dari kebijaksanaan dan perkembangan keadaan tersebut, maka penerimaan pembangunan dari Pendapatan Daerah sendiri ini telah dapat dihasilkan sebesar Rp. 4.920,0 juta yang berarti 74,95% di atas perkiraan penerimaan yang bersangkutan menurut Repelita III yaitu sebesar Rp. 2.812,2 juta.

Dengan mengikuti pengertian dan konsep Tabungan Pemerintah Daerah (Tingkat I) menurut Repelita III, yaitu kelebihan atau selisih antara seluruh pendapatan daerah sendiri dan bantuan pemerintah pusat dengan pengeluaran rutin. Maka dengan demikian tabungan pemerintah ini adalah sama dengan semua jumlah dana yang disalurkan untuk Pengeluaran atau Belanja Pembangunan dalam hubungan ini maka jumlah tabungan yang dapat dihasilkan yang jumlahnya sama dengan Belanja Pembangunan itu berturut-turut adalah tahun 1979/1980 sebesar Rp. 2.985,4 juta; tahun 1980/1981 sebesar Rp. 5.145,1 juta dan tahun 1981/1982 sebesar Rp. 9.683,5 juta. Perbedaan atau selisih antara realisasi jumlah penerimaan total dengan pengeluaran total yang terjadi selama tahun 1979/1980 dan 1980/1981 adalah karena Belanja Rutin dalam anggaran merupakan plafond yang tertinggi untuk dikeluarkan, dan kelebihannya dapat diperhitungkan untuk peningkatan anggaran tahun berikutnya.

## Alokasi Keuangan dan Belanja Pembangunan Daerah Tingkat I

Jumlah dana penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I yang terdiri dari Bantuan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Daerah sendiri tersebut, kesemuanya dianggarkan untuk digunakan dan dialokasikan bagi keperluan Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran/Belanja Pembangunan. Perkembangan serta proporsi dari pengalokasian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan yang direalisasi dan dianggarkan selama tahun 1979/1980-1981/1982 adalah menurut Tabel 2.

Tabel 2

BELANJA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT 1979/1980 - 1981/1982  
(dalam jutaan rupiah, harga berlaku)

Jenis	1979/1980	1980/1981	1981/1982	Jumlah	%
<i>I. Pengeluaran Rutin</i>	<i>19.027,4</i>	<i>29.929,2</i>	<i>38.775,6</i>	<i>87.732,2</i>	<i>100,00</i>
1. Belanja Pegawai	15.016,4	21.131,2	27.110,5	63.258,1	72,10
2. Belanja Barang	1.225,5	1.556,0	1.978,7	4.760,2	5,42
3. Belanja Pemeliharaan	337,4	365,4	499,6	1.202,4	1,37
4. Belanja Perjalanan Dinas	180,5	257,5	350,9	788,9	0,90
5. Belanja Lain-lain	407,6	546,4	1.394,7	2.348,7	2,68
6. Bantuan Rutin Daerah Tingkat II	1.695,2	5.849,3	7.201,2	14.745,7	16,81
7. Pengeluaran Tak Terduga	164,8	223,4	240,0	628,2	0,72
<i>II. Pengeluaran Pembangunan</i>	<i>2.985,4</i>	<i>5.145,1</i>	<i>9.683,5</i>	<i>17.814,0</i>	<i>100,00</i>
1. Bidang Ekonomi	1.648,4	2.982,5	5.174,1	9.805,0	55,04
2. Bidang Sosial	339,9	557,6	1.221,2	2.118,7	11,89
3. Bidang Umum	537,2	1.243,7	1.978,2	3.759,8	21,11
4. Subsidi Pembangunan Daerah Tingkat II	459,2	361,3	1.310,0	2.130,5	11,96
Jumlah	22.012,8	35.074,3	48.459,1	105.546,2	

Catatan: Tahun 1979/1980 dan 1980/1981 angka realisasi anggaran, tahun 1981/1982 angka APBD.

Dari Tabel 2 ternyata bahwa dari seluruh Belanja Daerah Tingkat I Sumatera Barat selama tiga tahun pertama Pelita III yang berjumlah Rp. 105.546,2 juta, Pengeluaran Rutin berjumlah Rp. 87.732,2 juta (83,12%) sedangkan Pengeluaran Pembangunan berjumlah Rp. 17.814,0 juta (16,88%) dari jumlah pengeluaran seluruhnya. Pengeluaran Rutin yang direalisasi dan dianggarkan tersebut telah melebihi dari perkiraan menurut Repelita III, yaitu sebesar Rp. 63.487,2 juta, namun dalam Repelita III proporsinya lebih besar yaitu 84,44% dari perkiraan jumlah pengeluaran keseluruhannya. Dengan demikian pengeluaran atau dana yang dapat disediakan untuk pembangunan

dalam realisasi dan penganggarnya ternyata relatif agak lebih baik atau lebih besar daripada yang dalam Repelita III, yang hanya sebesar 15,56%.

Selanjutnya dana yang dihimpun untuk pengeluaran pembangunan yang berjumlah Rp. 17.814,0 juta selama tiga tahun pertama Pelita III telah dialokasikan ke bidang ekonomi Rp. 9.805,0 juta (55,04%), bidang sosial Rp. 2.118,7 juta (11,89%), bidang umum Rp. 3.759,8 juta (21,11%) dan subsidi Pembangunan Daerah Tingkat II Rp. 2.130,5 juta atau 11,96% dari pengeluaran atau belanja pembangunan seluruhnya. Jumlah realisasi dan pengeluaran, pengeluaran pembangunan ini (Rp. 17.814,0 juta) telah melebihi 52,29% dari pengeluaran atau belanja pembangunan yang diperkirakan selama tiga tahun pertama menurut Repelita III yang berjumlah Rp. 11.697,8 juta. Dan dalam perkiraan Repelita III komposisi Belanja Pembangunan ini juga agak berbeda, yaitu terdiri dari: bidang ekonomi Rp. 6.033,7 juta (51,58%), bidang sosial Rp. 2.040,1 juta (17,44%), bidang umum Rp. 2.523,2 juta (21,57%) dan subsidi Pembangunan Daerah Tingkat II Rp. 1.100,8 juta atau 9,41% dari jumlah total pengeluaran pembangunan yang diperkirakan selama tiga tahun pertama Repelita III tersebut.

Sungguhpun masing-masing bidang pembangunan telah mencapai jumlah pembiayaan yang melebihi daripada apa yang diperkirakan dalam Repelita III, dan sasaran pembangunan tetap diprioritaskan pada pembangunan Bidang Ekonomi dengan tekanan pada sektor pertanian dan irigasi serta sektor perhubungan dan pariwisata. Namun selama tiga tahun terakhir ini tampak bahwa alokasi dana pembangunan Daerah Tingkat I yang terealisasi lebih banyak lagi ditekankan pada Bidang Ekonomi dan Subsidi Daerah Tingkat II (bawahan) dibandingkan dengan yang tersusun menurut perkiraan dalam Repelita III. Sebaliknya dana yang terealisasi dan teranggarkan untuk Bidang Sosial dan Bidang Umum perimbangannya relatif kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya.

## PROSPEK PEMBANGUNAN 1982/1983-1983/1984

### Umum

Selama dua tahun mendatang diperkirakan besarnya proyek-proyek Pelita Nasional (APBN) yang berlokasi di daerah Sumatera Barat masih tetap akan meningkat, tetapi tidak sepesat pertumbuhan pada Pelita II maupun selama tahun-tahun yang lalu. Diperkirakan anggaran proyek Pelita Nasional ini untuk daerah Sumatera Barat akan meningkat dengan laju pertumbuhan relatif lebih rendah, yaitu 12,23% dan 17,91%, sehingga selama dua tahun anggaran

mendatang jumlah anggaran Pelita Nasional adalah sebesar Rp. 168.638,4 juta. Dengan demikian selama Pelita III secara total diperkirakan jumlah biaya pembangunan proyek Pelita Nasional seluruhnya mencapai Rp. 341.729,5 juta. Ini berarti akan mencapai jumlah sebesar 38,39% di atas jumlah yang diperkirakan atau ditargetkan (Rp. 246.926,4 juta) menurut Repelita III Sumatera Barat. Di samping itu bantuan dana pembangunan daerah dari pusat yang sangat menunjang pembangunan Daerah Tingkat II dan sektoral khusus di daerah tersebut yaitu berupa Bantuan Inpres Pembangunan Daerah (tidak termasuk Bantuan Inpres Daerah Tingkat I) diperkirakan akan meningkat pula pada tahun-tahun mendatang, tetapi tidak sebesar laju pertumbuhan tiga tahun anggaran yang lalu, yaitu 60,10%. Karena prospek kondisi keuangan negara mendatang yang relatif kurang secerah sebelumnya, maka laju pertumbuhannya hanya kira-kira sama dengan periode Pelita II, yaitu sebesar 33,39% per tahun. Dengan demikian dua tahun anggaran mendatang Bantuan Inpres ini akan berjumlah Rp. 89.120,0 juta, sehingga secara keseluruhannya jumlah dana pembiayaan yang berupa Bantuan Inpres ini selama periode Repelita III akan berjumlah Rp. 147.655,1 juta.

Selanjutnya sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan yang berasal dari Daerah Tingkat I Sumatera Barat sendiri (termasuk Bantuan Inpres Daerah Tingkat I) selama dua tahun anggaran mendatang diperkirakan akan tetap meningkat, tetapi tidak sebesar laju pertumbuhan sebelumnya. Sesuai dengan RAPBD yang diajukan, untuk tahun 1982/1983 jumlah APBD meningkat sebesar 14,38% sehingga mencapai jumlah Rp. 52.989,6 juta. Dan diperkirakan untuk tahun anggaran selanjutnya jumlah total penerimaan APBD hanya meningkat 18,79% per tahun, jadi masing-masing berada di bawah peningkatan rata-rata tiga tahun sebelumnya, yaitu 37,36% per tahun. Dengan demikian jumlah total penerimaan APBD Daerah Tingkat I untuk dua tahun anggaran mendatang dianggarkan dan diperkirakan sebesar Rp. 116.766,8 juta dan untuk masa lima tahun Pelita III akan mencapai jumlah Rp. 224.566,5 juta.

Dengan memperhatikan perkembangan tahun-tahun yang lalu serta prospek di masa datang, maka pemupukan dana melalui lembaga perbankan diperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan untuk giro 26,35%, deposito 20,10% dan tabungan (termasuk Tabanas, Taska dan tabungan lainnya) sebesar 29,80% per tahun. Sehingga dengan demikian jumlah pemupukan dana dari perusahaan dan masyarakat lewat lembaga perbankan itu akan meningkat dari jumlah total sebesar Rp. 60.624,0 juta (1982) menjadi Rp. 76.252,9 juta (1983) dan Rp. 95.995,3 juta (1984).

Dengan meningkatnya jumlah pemupukan dana melalui perbankan tersebut, serta potensi dana perbankan di masa yang lalu, maka diperkirakan laju

pertumbuhan kredit perbankan beberapa tahun mendatang adalah sebesar 30,53% per tahun. Dengan demikian kredit perbankan keseluruhannya (termasuk Kredit Investasi, KIK dan KMKP) yang akan tersalur kepada usaha swasta atau masyarakat akan meningkat dari Rp. 130.327,3 juta (1982) menjadi Rp. 170.116,2 juta (1983) dan Rp. 222.052,7 juta (1984).

### **Prospek Sumber Keuangan dan Pembiayaan APBD Daerah Tingkat I**

Dengan mengingat kondisi keuangan negara yang relatif kurang secerah tahun-tahun sebelumnya, maka diperkirakan laju pertumbuhan bantuan dana dari sumber pemerintah pusat relatif akan lebih kecil pula. Dalam hubungan ini menurut yang diajukan dalam Nota Keuangan RAPBD Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka untuk tahun 1982/1983 dianggap subsidi rutin meningkat 12,84% dan subsidi pembangunan meningkat 20,0% dari anggaran tahun sebelumnya. Demikian pula pendapatan rutin sendiri meningkat 16,92% dan pendapatan pembangunan sendiri meningkat 10,73% dari anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tahun 1983/1984 diperkirakan akan terdapat keadaan keuangan dan anggaran penerimaan daerah yang agak lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya. Dan diperkirakan untuk tahun 1983/1984 akan terdapat peningkatan bantuan pemerintah pusat yang lebih besar, yaitu subsidi rutin meningkat 18,51% dan subsidi pembangunan 29,69% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Demikian pula pendapatan daerah sendiri diperkirakan akan meningkat yang lebih besar pula, yaitu pendapatan rutin (asli daerah) meningkat 19,16% dan pendapatan pembangunan sendiri meningkat 15,00% dibandingkan anggaran tahun 1982/1983.

Atas dasar asumsi, perkiraan dan perhitungan yang dikemukakan di atas, maka akan tercapai komposisi sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah menurut Tabel 3 berikut ini, dengan catatan di sini tidak termasuk sisa anggaran (rutin dan pembangunan) tahun yang lalu maupun SIAP tahun yang bersangkutan sebagaimana yang dicantumkan dalam Nota Keuangan RAPBD Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Dari Tabel 3 tersebut tampak bahwa Bantuan Pemerintah Pusat selama dua tahun anggaran mendatang akan mencapai jumlah Rp. 99.035,7 juta, sedangkan Pendapatan Daerah sendiri akan berjumlah Rp. 17.731,1 juta, jadi jumlah penerimaan daerah seluruhnya sebesar Rp. 116.766,8 juta. Dengan demikian selama periode 5 tahun Pelita III jumlah realisasi dan perkiraan Bantuan Pemerintah Pusat akan mencapai sebesar Rp. 188.354,7 juta, Pendapatan Daerah sendiri berjumlah Rp. 36.211,8 juta dan jumlah penerimaan APBD daerah seluruhnya sebesar Rp. 244.566,5 juta.

Tabel 3

REALISASI DAN PERKIRAAN SUMBER PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT 1979/1980 - 1983/1984  
(dalam jutaan rupiah, harga berlaku)

Jenis	1979/1980 -			Jumlah	%
	1981/1982	1982/1983	1983/1984		
I. Bantuan Pemerintah Pusat	89.319,0	44.862,7	54.173,0	188.354,7	83,87
1. Subsidi Rutin	73.985,0	55.862,7	42.500,9	152.348,6	67,84
2. Subsidi Pembangunan	15.334,0	9.000,0	11.672,1	36.006,1	16,03
II. Pendapatan Daerah Sendiri	18.480,7	8.126,9	9.604,2	36.211,8	16,13
1. Pendapatan Rutin	13.560,7	6.203,2	7.392,0	27.155,9	12,09
a. Pajak Daerah	9.517,1	4.643,3	5.709,4	19.869,8	8,85
b. Retribusi Daerah	2.144,1	770,0	838,4	3.752,5	1,67
c. Penerimaan Dinas-dinas	662,3	356,0	460,5	1.478,8	0,66
d. Laba Perusahaan Daerah	558,7	177,9	170,5	907,1	0,40
e. Lain-lain	678,5	256,0	213,2	1.147,7	0,51
2. Pendapatan Pembangunan	4.920,0	1.923,7	2.212,2	9.055,9	4,04
a. Ipeda 10%	283,3	126,0	145,7	555,0	0,25
b. Royalties/Lisensi Fee	2.186,0	634,0	697,5	3.517,5	1,57
c. Land Rent	35,8	50,0	141,0	226,8	0,10
d. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh	1.803,2	839,9	936,7	3.579,8	1,60
e. Lain-lain	611,7	273,8	291,3	1.176,8	0,52
Jumlah	107.799,7	52.989,6	63.777,2	224.566,5	100,00

Catatan: Tahun 1982/1983 angka RAPBD dan tahun 1983/1984 angka perkiraan (proyeksi).

Bila dibandingkan dengan perkiraan dalam Repelita III, maka jumlah realisasi dan perkiraan Bantuan Pemerintah Pusat akan mencapai sebesar 39,58% lebih tinggi di atas perkiraan sebelumnya (Rp. 134.267,5 juta), Pendapatan Daerah sendiri lebih tinggi sebesar 16,13% daripada perkiraan sebelumnya (Rp. 22.137,4 juta) dan jumlah total Penerimaan Daerah seluruhnya akan mencapai sebesar 43,38% di atas perkiraan sebelumnya (Rp. 156.404,9 juta) sebagaimana yang dikemukakan dalam Repelita III Sumatera Barat.

Selanjutnya peranan dan komposisi pos-pos penerimaan dalam realisasi dan perkiraan selama Pelita III dibandingkan dengan yang tercantum dalam Repelita III juga akan mengalami sedikit perubahan dan pergeseran, yaitu Bantuan Pemerintah Pusat dari 85,85% menjadi 83,87%, Pendapatan Daerah sendiri dari 14,15% menjadi 16,13% dari total pemerintah daerah seluruhnya. Jadi sungguhpun peranan atau bagian penerimaan daerah yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat tetap mendominasi dalam jumlah total penerimaan daerah, tetapi perimbangannya telah dan akan sedikit bergeser (1,98%) dari Bantuan Pemerintah Pusat ke Pendapatan Daerah sendiri.

## Prospek Alokasi Keuangan dan Belanja Pembangunan Daerah Tingkat I

Atas dasar petunjuk dan pedoman bahwa dalam penyusunan APBD Daerah perlu selalu diberlakukan prinsip anggaran berimbang, maka untuk dua tahun anggaran mendatang pendapatan total daerah 1982/1983 dan 1983/1984 akan diseimbangkan dengan pengeluaran total daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Namun dalam Nota Keuangan RAPBD Daerah Tingkat I Sumatera Barat di dalam penganggarannya itu sudah diperhitungkan sisa lebih anggaran (rutin dan pembangunan) tahun sebelumnya serta sisa anggaran pembangunan yang diperkirakan terjadi tahun yang bersangkutan (dalam bentuk PM), sedangkan dalam analisa di sini tidak termasuk sisa anggaran tersebut. Dengan demikian jumlah pengeluaran tahun 1982/1983 yang dianggarkan (tidak termasuk sisa anggaran) adalah sebesar Rp. 54.419,6 juta dan tahun 1983/1984 diperkirakan sebesar Rp. 63.565,0 juta.

Selanjutnya dengan mengambil angka Nota Keuangan RAPBD yang diajukan untuk tahun 1982/1983, dan dengan mengasumsikan bahwa: (a) jumlah total penerimaan sama dengan jumlah total pengeluaran; dan (b) jumlah total pengeluarannya dialokasikan menurut proporsi yang sama seperti tahun 1982/1983, maka akan diperoleh jumlah realisasi, anggaran, dan perkiraan selama dua tahun anggaran mendatang dan selama lima tahun anggaran Pelita III adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.

Dari perkiraan menurut Tabel 4 ternyata bahwa jumlah pengeluaran rutin selama dua tahun anggaran mendatang adalah sebesar Rp. 90.765,0 juta, sedangkan pengeluaran pembangunan sebagai hasil dari terciptanya Tabungan Daerah adalah sebesar Rp. 27.219,6 juta. Dengan demikian selama periode lima tahun Pelita III jumlah realisasi dan perkiraan Pengeluaran Rutin mencapai sebanyak Rp. 178.497,2 juta, yaitu 38,19% di atas jumlah yang diperkirakan semula (Rp. 135.445,7 juta), sedangkan Pengeluaran Pembangunan mencapai sebanyak Rp. 45.033,6 juta, jadi 52,29% di atas jumlah yang diperkirakan semula (Rp. 20.959,2 juta) menurut Repelita III.

Jika ditinjau lebih lanjut ternyata bahwa pengeluaran rutin yang dilaksanakan dan diperkirakan selama lima tahun Pelita III adalah 79,85% sedangkan pengeluaran pembangunan sebesar 20,15% dari jumlah total pengeluaran daerah keseluruhannya. Dibandingkan dengan perimbangan perkiraan dalam Repelita III di mana Pengeluaran Rutin 86,60% dan Pengeluaran Pembangunan 13,40%, berarti yang terjadi dan diperkirakan terjadi merupakan suatu kondisi yang relatif lebih baik daripada perkiraan Repelita III, yaitu adanya penggeseran bagian anggaran sebesar 6,75% dari Pengeluaran Rutin ke Pengeluaran Pembangunan.

Tabel 4

PERKIRAAN ALOKASI KEUANGAN DAN BELANJA  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, 1979/1980 - 1983/1984  
(dalam jutaan rupiah, harga berlaku)

Jenis	1979/1980 - 1981/1982	1982/1983	1983/1984	Jumlah	%
<i>I. Pengeluaran Rutin</i>	<i>87.732,2</i>	<i>41.864,4</i>	<i>48.900,6</i>	<i>178.497,2</i>	<i>100,00</i>
1. Belanja Pegawai	63.258,1	29.088,0	33.975,5	126.321,6	70,77
2. Belanja Barang	4.760,2	2.801,5	3.273,6	10.835,3	6,07
3. Belanja Pemeliharaan	1.202,4	698,9	813,7	2.715,0	1,52
4. Belanja Perjalanan Dinas	788,9	474,2	553,0	1.816,1	1,02
5. Belanja Lain-lain	2.348,7	1.395,9	1.633,6	5.378,2	3,01
6. Bantuan Rutin Daerah Tingkat I	14.745,7	7.205,9	8.416,0	30.367,6	17,01
7. Pengeluaran Tak Terduga	628,2	200,0	235,2	1.063,4	0,60
<i>II. Pengeluaran Pembangunan</i>	<i>17.814,0</i>	<i>12.555,2</i>	<i>14.466,0</i>	<i>45.033,6</i>	<i>100,00</i>
1. Bidang Ekonomi	9.805,0	6.000,5	7.011,2	22.816,7	50,66
2. Bidang Sosial	2.118,7	1.969,4	2.301,0	6.389,1	14,19
3. Bidang Umum	3.759,8	2.980,2	3.477,0	10.217,0	22,69
4. Subsidi Pembangunan Daerah Tingkat II	2.130,5	1.605,1	1.875,2	5.610,8	12,48
Jumlah Pengeluaran	105.546,2	54.419,6	63.565,0	—	—

*Catatan:* Tahun 1982/1983 angka RAPBD dan tahun 1983/1984 angka perkiraan (proyeksi).

Selanjutnya mengenai perimbangan jumlah pengeluaran menurut bidang dapat dikemukakan bahwa alokasi anggaran yang direalisasi dan diperkirakan selama periode Pelita III adalah pada Bidang Ekonomi sebesar Rp. 22.816,7 juta yaitu 111,06% di atas yang diperkirakan semula (Rp. 10.810,7 juta), Bidang Sosial sebesar Rp. 6.389,1 juta, yaitu 74,79% di atas yang diperkirakan semula (Rp. 3.655,3 juta), Bidang Umum sebesar Rp. 10.217,0 juta yaitu 125,5% lebih besar daripada perkiraan semula (Rp. 4.520,9 juta) dan subsidi Pembangunan Daerah Tingkat II sebesar Rp. 5.610,8 juta yaitu 184,48% lebih besar daripada perkiraan semula (Rp. 1.972,3 juta) menurut Repelita III. Dan perimbangan alokasi anggaran menurut bidang yang direalisasi dan diperkirakan selama Pelita III ini adalah Bidang Ekonomi 50,66%, Bidang Sosial 14,19%, Bidang Umum 22,69% dan Subsidi Pembangunan Daerah Tingkat II 12,46% dibandingkan dengan yang tercantum dalam perkiraan menurut Repelita III terdapat perbedaan yang agak besar yaitu Bidang Ekonomi 51,58%, Bidang Sosial 17,44%, Bidang Umum 21,57% dan Subsidi Daerah Tingkat II 9,41%. Dengan demikian terdapat penggeseran anggaran sebesar 4,17% dari Bidang Sosial dan Bidang Ekonomi ke arah Bidang Umum dan Subsidi Daerah Tingkat II dari apa yang direalisasi dan diperkirakan terjadi dibanding dengan apa yang dikemukakan dan diperkirakan menurut Repelita III.

## KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN MENJELANG AKHIR REPELITA III

### Umum

Sumber pembiayaan pembangunan yang nonpemerintah yaitu: sumber pembiayaan tabungan perusahaan dan perorangan melalui perbankan seperti Tabanas, Taska dan tabungan lainnya, sumber pembiayaan perkreditan seperti Kredit Investasi, KIK, KMKP dan lain-lain, sumber pembiayaan penanaman modal swasta seperti melalui PMDN dan PMA serta bantuan luar negeri pada dasarnya ditentukan atau dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan tindakan secara sentral dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan melalui berbagai kebijaksanaan negara, yaitu di bidang fiskal, moneter, perkreditan, hubungan ekonomi dan moneter luar negeri, dan sebagainya.

Sedangkan sumber pembiayaan pembangunan pemerintah dapat dikemukakan tiga komponen yang utama, yaitu: (a) Pembiayaan melalui APBN (proyek sektoral Pelita Nasional) untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka dekonsentrasi; (b) Pembiayaan melalui APBN yang dialokasikan atau disalurkan ke daerah dalam bentuk Bantuan Inpres yang diperhitungkan ke dalam APBD daerah; dan (c) Pembiayaan melalui APBD daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka desentralisasi. Pengaturan dan upaya yang menyangkut sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan pemerintah ini dilaksanakan melalui kebijaksanaan keuangan dan anggaran pemerintah, pusat maupun daerah, baik yang diatur secara sentral maupun yang dapat ditetapkan di tingkat daerah.

Kebijaksanaan dan usaha pemerintah pusat ke arah perbaikan, intensifikasi dan penyempurnaan yang menyangkut sumber pembiayaan pembangunan itu selalu dilakukan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Lebih-lebih lagi dengan kondisi keuangan negara yang tidak secerah tahun-tahun yang lalu sebagai akibat pembekuan harga minyak OPEC, resesi dunia yang berlarut-larut, gejolak ekonomi dan moneter luar negeri, kesemuanya turut berpengaruh terhadap perekonomian dan keuangan negara. Dengan demikian tindakan dan upaya pemerintah pusat yang menyangkut dengan peningkatan program pembangunan dan sumber pembiayaannya diperkirakan akan lebih menonjol dan meningkat lagi, khususnya menjelang akhir Repelita III.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kebijaksanaan dan usaha di tingkat daerah, khususnya oleh pemerintah daerah, adalah melakukan berbagai kebijaksanaan dan usaha yang bersifat menunjang kebijaksanaan dan

usaha pemerintah tingkat pusat. Upaya dalam memperbesar partisipasi dan kontribusi daerah yang sejalan dan terpadu dengan pusat perlu lebih ditingkatkan. Di sini usaha dan tindakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam menunjang pusat sangat perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Dengan demikian diharapkan sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan akan berjalan lebih intensif dan akan menjadi lebih terhimpun, terarahkan dan terintegrasi secara terpadu dengan sumber pembiayaan dan program pembangunan daerah.

### **Keadaan Daerah, Sumber Pembiayaan dan Program Pembangunan**

Baik dari perkiraan Repelita III Sumatera Barat maupun dalam realisasi dan penganggaran selama Repelita III yang sedang berjalan ini, nyatalah bahwa keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah (khususnya Daerah Tingkat I) terutama bersumber dari dana Bantuan Pemerintah Pusat. Sekitar 83-86% dari penerimaan daerah berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat dan hanya sekitar 14-17% saja yang bersumber dari daerah sendiri. Ini berarti bahwa pertama-tama untuk masa mendatang, khususnya menjelang akhir Pelita III, diusahakan terus agar pemakaian sumber dana dari pusat itu dilaksanakan dan diatur secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan tetap berlakunya prinsip anggaran berimbang berarti untuk meningkatkan belanja pembangunan perlu dilakukan pada satu pihak peningkatan penerimaan sendiri yang berasal dari daerah sendiri. Dalam hubungan ini usaha peningkatan sumber penerimaan daerah perlu diteruskan, yaitu dengan melaksanakan kebijaksanaan dan upaya intensifikasi pemungutan perpajakan dan penerimaan daerah sendiri.

Di lain pihak prinsip itu juga berarti perlu dilaksanakan penghematan pengeluaran rutin daerah. Dalam hal ini diatur penggunaan dana secara efektif dan efisien dengan melakukan pembatasan dan penghematan belanja rutin. Dengan demikian akan dapat tercipta tabungan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja pembangunan. Kebijaksanaan dan usaha tersebut di atas telah cukup menunjukkan hasilnya selama tiga tahun anggaran Pelita III, yaitu tabungan daerah untuk belanja pembangunan telah meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp. 2.985,4 juta (1979/1980) menjadi Rp. 5.145,1 juta (1980/1981) dan Rp. 9.683,5 juta (1981/1982) dengan peningkatan rata-rata 80,10% per tahun. Kebijaksanaan dan usaha ini perlu dilanjutkan terus di masa mendatang khususnya menjelang akhir Pelita III.

Selanjutnya kedudukan program dan proyek pembangunan daerah merupakan penunjang, pelengkap dan bagian integral dari program pembangunan

nasional, sehingga program dan proyek pembangunan daerah bertujuan untuk memperbesar partisipasi dan kontribusi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam hubungan ini kebijaksanaan dan program kerja pemerintah daerah perlu tetap berpedoman pada garis kebijaksanaan pembangunan nasional, khususnya atas landasan trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Bahkan pedoman kebijaksanaan ini perlu diusahakan dengan lebih nyata lagi tercermin dalam penyusunan program dan proyek pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya menjelang akhir Repelita III.

Di samping itu dalam menetapkan pilihan proyek dalam setiap program yang tertuang dalam APBD, agar tetap selalu diperhatikan daya guna dan hasil guna dalam alokasi pemakaian anggaran. Dengan demikian secara bertahap akan dapat diwujudkan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan yang semakin merata dan adil serta akan dapat diletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya.

Pada umumnya dalam batas taraf kemampuan, dana dan daya tersedia, kebijaksanaan dan program yang dikemukakan di atas itu telah cukup menjadi landasan dan dasar kebijaksanaan pembangunan daerah dalam periode tiga tahun anggaran yang lalu, dan selanjutnya khususnya untuk dua tahun mendatang menjelang akhir Pelita III, kebijaksanaan dan langkah-langkah serta program kerja pembangunan tersebut perlu ditingkatkan dan disempurnakan lagi.

Dalam hubungan dengan itu dari segi penerimaan daerah sendiri masih perlu ditingkatkan kebijaksanaan perpajakan daerah secara terpadu dalam menunjang peningkatan investasi, program pembangunan dan produksi/pendapatan regional di satu pihak, dan menunjang usaha pemerataan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja di lain pihak. Kebijaksanaan dan usaha intensifikasi perpajakan daerah perlu disertai dengan berbagai langkah dan usaha dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik pada wajib pajak, penertiban dan pengawasan terpadu terhadap aparat keuangan daerah dan peningkatan disiplin perpajakan serta kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat.

Dari segi pengeluaran daerah, selain kebijaksanaan dan usaha penghematan belanja rutin, maka pengeluaran atau belanja pembangunan perlu dilakukan dengan lebih terarah dan terpadu. Di samping kebijaksanaan dan program kerja sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perimbangan anggaran pembangunan menurut bidang dan sektor pembangunan ke arah yang lebih menunjang dan mendukung rencana dan program pembangunan secara menyeluruh dan terpadu patut lebih mendapat perhatian lagi. Dalam hubungan ini memang bidang ekonomi khususnya sektor pertanian dan prasarana

mendapat prioritas dalam belanja pembangunan. Tetapi untuk dua tahun anggaran mendatang perlu agak lebih ditempatkan lagi pada proporsi yang lebih wajar sesuai dengan Repelita III, dengan sedikit lebih meningkatkan belanja pembangunan bidang sosial khususnya pembangunan sektor pendidikan dan pembinaan generasi muda.

## KESIMPULAN

Sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah Sumatera Barat telah berkembang dan meningkat cukup besar selama tiga tahun pertama Pelita III dan dianggarkan serta diperkirakan akan meningkat terus di masa-masa mendatang, khususnya menjelang akhir Pelita III. Dan data realisasi serta penganggaran dari sumber dana dan pembiayaan pembangunan tersebut telah menunjukkan peningkatan yang melebihi dari jumlah yang ditargetkan untuk selama tiga tahun pertama Pelita III. Tendensi ini akan berlangsung terus sehingga pada umumnya, baik segi penerimaan maupun segi pengeluaran, dana yang akan direalisasikan dan dianggarkan adalah cukup besar melebihi dari yang ditargetkan dan diperkirakan dalam perencanaan Repelita III yang disusun sebelumnya.

Mengingat kebutuhan akan peningkatan pembangunan di masa mendatang, maka keperluan akan dana pembiayaan pembangunan yang bersumber dari nonpemerintah maupun dalam bentuk sumber APBN dari pusat meningkat pula. Sehingga sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan ini perlu diusahakan dan ditingkatkan di masa mendatang, khususnya menjelang akhir Pelita III. Dalam hubungan ini kebijaksanaan dan usaha pemerintah pusat di bidang fiskal, moneter, perkreditan, dan sebagainya ke arah perbaikan, intensifikasi dan penyempurnaan yang menyangkut dengan sumber pembiayaan tersebut telah dilakukan dan bahkan perlu ditingkatkan di masa mendatang, lebih-lebih mengingat perekonomian dan keuangan negara kita cukup peka terhadap pengaruh ekonomi dan moneter dunia. Dalam hubungan ini pemerintah daerah perlu meletakkan kebijaksanaan dan usaha yang menunjang dan melengkapi kebijaksanaan dan usaha pemerintah tingkat pusat tersebut.

Demikian pula dalam hal keuangan, dan pembiayaan daerah, yang bersumber dari pusat maupun dari daerah sendiri, sebagaimana tercermin dalam APBD daerah, mengingat kebutuhan akan peningkatan pembangunan daerah, perlu dilanjutkan usaha peningkatannya yang berjalan selama ini maupun untuk tahun-tahun mendatang. Dalam hubungan ini kebijaksanaan dan usaha peningkatan besarnya Tabungan Daerah dengan menghemat Belanja Rutin di satu pihak dan meningkatkan Penerimaan Daerah sendiri di lain pihak yang dilakukan selama ini perlu ditingkatkan di masa mendatang, khususnya menjelang akhir Pelita III.

Selanjutnya kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang memberlakukan prinsip anggaran berimbang, memberlakukan program dan proyek pemerintah daerah sebagai penunjang dan pelengkap program pembangunan nasional, menetapkan pilihan program/proyek dalam alokasi anggaran APBD dengan memperhatikan daya guna dan hasil gunanya, menentukan arah subsidi pada daerah bawahan yang diberikan melalui APBD Daerah Tingkat I yang berjalan selama ini, tetap dipakai untuk masa mendatang khususnya menjelang akhir Pelita III. Bahkan kebijaksanaan dan usaha tersebut perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Kebijaksanaan dan usaha berupa pengaturan perpajakan daerah secara konsepsional dan terpadu, intensifikasi pemungutan penerimaan keuangan daerah, perbaikan prosedur dan pelayanan pada wajib pajak, pengawasan terpadu terhadap aparaturnya dan administrasi keuangan daerah, peningkatan disiplin perpajakan dan kepatuhan wajib pajak perlu dilanjutkan terus dan bahkan lebih dimantapkan dan ditingkatkan untuk masa mendatang.

Dari segi pengeluaran daerah selain kebijaksanaan penghematan Belanja Rutin, maka Belanja Pembangunan perlu diatur dan dilaksanakan dengan lebih terarah dan terpadu. Sejalan dengan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, maka kebijaksanaan pemberian prioritas serta asas keseimbangan dan keselarasan dalam alokasi pembiayaan pembangunan daerah perlu lebih mendapat perhatian lagi di masa-masa mendatang, khususnya menjelang akhir Pelita III.

#### SUMBER DATA DAN INFORMASI

1. Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/1980 - 1983/1984* Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Daerah Sumatera Barat* (Tahun 1979/1980, Tahun 1980/1981, Tahun 1981/1982 dan Tahun 1982/1983).
3. Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, *Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat* pada DPRD Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Tahun 1979/1980).
4. Republik Indonesia, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada DPR-Republik Indonesia* (Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita III, Pelaksanaan Pembangunan Tahun 1980/1981).
5. Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tentang *Perkembangan Proyek-proyek Pelita Nasional* (Tahun 1979/1980 dan Tahun 1980/1981).
6. Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, *Daftar Lokasi Proyek-proyek Pelita Nasional Tahun 1981/1982 di Sumatera Barat*.
7. Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka* (Tahun 1979 dan Tahun 1980).
8. Bank Indonesia Cabang Padang, *Data Statistik Perbankan di Sumatera Barat*, Triwulan IV, 1981.